



Radar Bali

Tiga Pejabat Dinas PUPR Badung Diperiksa

Terkait Dugaan Korupsi Senderan Tukad mati

DENPASAR - Tiga pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Badung, Selasa (23/5) kemarin menjalani pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar. Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi senderan Tukad Mati, Badung.

Kepala Kejari (Kajari) Denpasar, Erna Normawati Widodo Putri didampingi Kasi Intelejen IGNA Kusumayasa Diputra menyebutkan, ketiga pejabat yang diperiksa penyidik Kejari itu diantaranya Kadis PUPR Badung, IB Surya Suamba selaku pejabat

pengguna anggaran (PPA), Kabid Sumber Daya Air PUPR Badung AA Gde Dalem selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan anggota Panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) I Gede Suardana. "Hari ini kami melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang dari Badung sebagai saksi guna memperdalam penyidikan umum terkait senderan Tukad Mati yang dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan," jelas Erna.

Dijelaskan, dalam kasus ini penyidik setidaknya juga telah memeriksa belasan saksi.

Secara umum, kata Erna, jumlah saksi yang akan diperiksa dan sudah diperiksa mulai dari kepanitian hingga rekanan penyedia barang dan jasa.

"Sementara ini yang sudah kami periksa kalau tidak salah ada 11-

orang. Kalau untuk semua saksi, ada sekitar 20-an. Saksi mulai dari kepanitian termasuk penyedia barang dan jasa. Untuk Direktur PT Undagi Jaya Mandiri Sanur sudah dilakukan pemeriksaan. Tapi untuk anggota dan stafnya di lapangan belum diperiksa. Masih ada beberapa saksi lagi yang akan diperiksa," ujar Erna.

Terkait pernyataan kadis PUPR Badung di media massa yang mengatakan proyek itu masih dalam tahap pemeliharaan, Erna dengan tegas menyatakan dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan sudah jauh dari masa pemeliharaan. Menurutnya, masa pemeliharaan terjadi dari Januari sampai Juni 2016. Sedangkan penyelidikannya masuk Oktober 2016. "Kalau dikatakan sudah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap senderan tukad mati itu,

perbaikannya sendiri itu dilakukan setelah kami melakukan penyelidikan. Penyelidikannya kan Oktober 2016. Perbaikannya dilakukan setelah kami melakukan penyelidikan dan turun ke lapangan. Saat itu, yang kami tahu baru akan dilakukan perbaikan. Yang kami ketahui seperti itu. Bukan perbaikan di masa pemeliharaan atau masa sebelum pekerjaan itu diserahkan Desember 2016," terangnya.

Selain itu kata Erna, jika dihitung angka dari dananya, maka hanya lima persen.

"Sementara 95 persen dana sudah diberikan atau dicairkan. Makanya kami akan periksa juga bagian keuangannya. Kapan dana itu diserahkan sesuai tahapan termin yang sudah tertantum atau tertuang di dalam kontrak itu," jelasnya.

Edisi : Rabu, 24 Mei 2017

Hal : 23